

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jepang memiliki ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah pertumbuhan yang luar biasa pasca Perang Dunia II pada abad ke-20. Peran Jepang sangatlah besar dalam hubungan internasional. Hal ini dikarenakan Jepang sangatlah berkontribusi pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai perdamaian, kemakmuran dan stabilitas di dunia. Contohnya seperti Jepang melakukan perang terhadap terorisme, membantu dan menjamin pertumbuhan ekonomi dunia serta melindungi lingkungan. Jepang juga ikut membantu memerankan peran aktif dalam membina stabilitas regional dengan memperkuat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara yang luar biasa.

Negara Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju dalam hal politik, ekonomi dan pendidikan. Namun, dibandingkan dengan negara maju lainnya, negara Jepang masih memiliki kondisi di mana perempuan di Jepang masih tergolong rendah untuk dapat bekerja di negaranya sendiri dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Hal ini dikarenakan tenaga kerja perempuan Jepang cenderung tidak memegang posisi penting dibandingkan laki-laki Jepang (<https://globalsherpa.org/japan/>).

Persaingan dalam ekonomi adalah hal yang tidak dapat dihindari baik untuk negara maju maupun negara berkembang dan peran perempuan di dunia kerja sangatlah rendah terutama di posisi manajerial dan pimpinan. Permasalahan ini hampir terjadi di seluruh negara. Salah satunya permasalahan peran perempuan di dunia kerja dan posisi pimpinan terjadi di Jepang.

Persaingan ekonomi dapat membantu dinamika suatu negara, hal itu perlu diimbangi dengan adanya ketersediaan dari faktor pendukung dalam siklus ekonomi seperti tenaga kerja. Tetapi, pada tahun 2020 Jepang masih memiliki kekurangan terhadap ketersediaan dari tenaga kerja, hal ini memberi dampak terhadap pertumbuhan suatu negara seperti Jepang. Di Jepang faktor pendukung masih

kurang dikarenakan adanya kesetaraan *gender* di Jepang sangat tinggi (<https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-56743670>).

Kesetaraan *gender* di Jepang dikenal sebagai hubungan relasi antara *gender* hierarki dan patriarki yang tidak dapat dipisahkan akibat adanya krisis ekonomi di dunia maupun di Jepang. Hierarki adalah sebuah alat yang digunakan untuk menguraikan elemen-elemen seperti benda, nilai, nama dan sejenisnya yang di dalamnya disebutkan hak-hak serta keputusan yang mana akan diambil, sedangkan patriarki sendiri merupakan sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan yang telah ada di Jepang sejak zaman Meiji (freedomnesia.id/hirarki), (<https://www.uui.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam>).

Kesetaraan *gender* tidak lepas dari keseimbangan antara laki-laki dan perempuan khususnya di dunia kerja. Di Jepang, masyarakatnya memiliki sistem budaya patriarki dimana laki-laki menjadi pemegang kekuasaan utama dalam ruang lingkup keluarga maupun ruang lingkup publik. Hal ini menyebabkan perempuan dalam budaya patriarki di Jepang, tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu perempuan memiliki hambatan untuk berpartisipasi secara aktif di ruang publik.

Populasi di Jepang merupakan populasi yang cepat menurun dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pada tahun 1999 Kathy Matsui yang merupakan ahli strategi dalam bidang investasi di Golden Sachs, beliau menyatakan penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam jumlah tenaga kerja perempuan sehingga Shinzo Abe menerapkan kebijakan ini untuk Jepang dan menamai kebijakan tersebut yaitu kebijakan *Abenomics* (<https://www.goldmansachs.com/intelligence/investing-in-women/bios-pdfs/womenomics-pdf.pdf>).

John M. Keynes mengemukakan Teori Keynesianisme yaitu teori ekonomi yang berorientasi terhadap intervensi pemerintah pada perekonomian suatu negara. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa penguasa politik atau Pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi melalui implementasi kebijakan. Teori ini muncul ketika dunia mengalami *Great Depressions* di mana pengangguran merupakan salah satu

masalah utama yang sangat perlu ditangani. Meski perekonomian membaik tetapi Pemerintah harus turun tangan dalam kegiatan ekonomi sehingga ketika kebijakan *Womenomics* direalisasikan, Jepang masih memiliki tingkat pengangguran hingga saat ini (<https://medium.com/cerita-publik/seri-cendekia-02-john-maynard-keynes-53419701a33e>).

Womenomics istilah yang diciptakan dengan menggabungkan kata “*women*” yang berarti wanita dan “*economy*”, yang berarti ekonomi, dan menggambarkan revitalisasi pada ekonomi melalui peran aktif wanita dan fokus pada kekuatan wanita sebagai pekerja dan konsumen. *Womenomics* sendiri pertama kali dicetuskan oleh Kathy Matsui pada tahun 1999. Hal ini didasarkan pada gagasan yang bertujuan untuk memajukan ekonomi khususnya pada perempuan agar dapat meningkatkan perekonomian pada suatu negara.

Pada tahun 2012, sejak Shinzo Abe menjabat menjadi Perdana Menteri Jepang pada 12 September 2012. Shinzo Abe mengupayakan untuk menerapkan kebijakan yang diciptakan oleh Kathy Matsui yaitu *Womenomics* agar diterapkan di Jepang yang bertujuan membantu dan meningkatkan perekonomian Jepang. Selain untuk membantu perekonomian Jepang, penerapan kebijakan *Womenomics* juga dapat membantu perempuan untuk memasuki dunia kerja sehingga tidak hanya laki-laki yang dapat bekerja tetapi perempuan juga dapat ikut bekerja di perusahaan manapun.

Pada tahun 2013, kebijakan *Womenomics* dapat direalisasikan di Jepang. Hal ini di karenakan Seperempat populasi perempuan penduduk Jepang sebanyak 65.388 di mana turun sekitar 0,15% dan partisipasi perempuan terhadap dunia kerja masih relatif rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya, sehingga Perdana Menteri Shinzo Abe menerapkan kebijakan *Womenomics* atau *Abenomics* tersebut agar Perekonomian Jepang dapat meningkat. (<https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/en/c/2015/04-Apr/japaninfo-2015-04/03.html>).

Pada tahun yang sama yaitu 2013, Jepang mengadopsi atau menjadikan *Womenomics* sebagai pilar dalam upaya mengurangi ancaman terhadap ekonomi Jepang. Sebagai hasil dari kebijakan tersebut, ekonomi internasional Jepang terbentuk dan memiliki dampak di berbagai sektor ekonomi yang signifikan pada

kebijakan gender baru oleh Shinzo Abe. Kebijakan tersebut atas rekomendasi dari berbagai organisasi ekonomi internasional yang telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam membentuk kebijakan gender Shinzo Abe yang baru (https://www.researchgate.net/publication/322807481_Womenomics_-_A_Model_for_a_New_Family_Policy_in_Japan).

Menurut Helen Macnaughtan yang merangkum *Womenomics* sebagai teori yang dapat memungkinkan perempuan untuk memiliki akses ke partisipasi yang sama dalam ekonomi dan masyarakat yang akan menghasilkan manfaat ekonomi dan kemajuan sosial. Secara teori, *Womenomics* adalah kebijakan yang layak untuk diterapkan di Jepang tetapi menurut Helen Macnaughtan, norma dan praktik gender dalam masyarakat Jepang masih menjadi penghalang untuk direalisasikan. (<https://apjif.org/-Helen-Macnaughtan/4302/article.pdf>).

Pendekatan untuk meningkatkan tingkat partisipasi tenaga kerja terutama perempuan, terbukti menjadi cara yang paling efektif untuk menerapkan kebijakan *Womenomics* yang ada di Jepang. Pada tahun 2013, Jepang menduduki posisi 105 dari 133 di berbagai negara dalam *Global Gap Report* yang diadakan oleh *World Economic Forum* di mana Jepang menduduki posisi di bawah Kamboja dan di atas Nigeria. Dari tinggi angka kebutuhan atas tenaga kerja dan tingginya angka pekerja dengan umur diatas rata-rata kepada perempuan di dalam sektor kerja sangatlah rendah, bahkan peranan perempuan Jepang dalam posisi pimpinan atau menajerial masih tergolong rendah yaitu sekitar 10% karena perempuan di Jepang belum banyak mengisi peranan penting dalam dunia kerja di Jepang. Hal ini didasarkan pada rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam bekerja. Hanya 63% wanita Jepang yang bekerja dibandingkan pria sekitar 85% dan hal inilah yang menyebabkan tingkat wanita terendah yang ikut berpartisipasi dalam forum tersebut dibandingkan dengan negara-negara lainnya. (<https://jurnalhiuns.files.wordpress.com/2016/04/jurnal-andrians-womenomics-kebijakan-pro-gender-2016.pdf>)

Dalam laporan mengenai daftar untuk mengukur kesetaraan gender (*Global Gap Report*) yang diadakan pada tahun 2013, Jepang menduduki posisi 105 dari 133 di berbagai negara yang diadakan oleh *World Economic Forum*. Peran

perempuan di Jepang sangatlah rendah sekitar 10% dalam peran sebagai posisi pimpinan atau manajerial. Kebijakan *Womenomics* merupakan rekomendasi dari berbagai ekonomi internasional yang memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Shinzo Abe.

Pada tahun 2022, menurut laporan Kesenjangan Gender Global 2022 dari World Economic Forum menemukan bahwa penurunan skor dalam kategori partisipasi dan peluang ekonomi yang disebabkan oleh penurunan yang tidak proporsional dalam partisipasi tenaga kerja perempuan dengan posisi legislatif dan manajerial yang juga menurun sebesar 9,8%. Hal ini menyebabkan penurunan partisipasi legislatif terhadap perempuan Jepang dan menyebabkan Jepang tertinggal jauh dengan negara maju lainnya, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi (<https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/17/business/women-workforce-post-pandemic/>).

Permasalahan lain yang terjadi pada bidang ketenagakerjaan khususnya perempuan yang bekerja yaitu dampak setelah adanya kebijakan *Womenomics* yang di realisasikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2013. Sebelum adanya kebijakan *Womenomics* jelas terdapat perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan. Karena Jepang sangatlah menjunjung tinggi posisi laki-laki dalam dunia kerja sehingga perempuan di Jepang dianggap tidak dapat melakukan pekerjaan laki-laki maka penulis ingin menganalisis dampak *Womenomics* terhadap kesetaraan gender sebelum dan sesudah masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe (2013-2022).

1.2 Penelitian yang Relevan

Berikut beberapa hasil penelitian yang telah digunakan penulis untuk mendapatkan referensi sebelumnya, sebagai berikut:

1. *Womenomics vs Women: Neoliberal Cooptation of Feminism in Japan* oleh Chelsea Szendi Schieder dari Assistant Professor, School of Political Science and Economics, Meiji University, Japan pada tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang kebijakan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kesempatan kerja bagi segmen elit perempuan. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan *Womenomics* agar tetap bersinar di lingkungan pekerjaan sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian Chelsea berfokus pada tuntutan feminisme yang terjadi dalam kebijakan *Womenomics* pada Pemerintahan Shinzo Abe sedangkan penulis berfokus pada dampak yang terjadi pada kebijakan *Womenomics* pada pemerintahan Shinzo Abe.

2. *Womenomics sebagai Mekanisme Peningkatan Peran Perempuan di Jepang: Studi Kasus Kebijakan Pro-Gender di Era Pemerintahan Shinzo Abe Periode ke 2* oleh Andrian Saputra pada tahun 2016. Jurnal ini membahas tentang peningkatan peran perempuan Jepang di sektor ketenagakerjaan pasca diimplementasikannya enam program utama kebijakan *Womenomics*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas proses terbentuknya kebijakan *Abenomics* menuju *Womenomics* yang dilakukan oleh Shinzo Abe. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian Andrian berfokus pada mekanisme program kebijakan *Womenomics* sedangkan penulis berfokus pada agenda kebijakan *Womenomics* yang diterapkan dan dampaknya terhadap perekonomian Jepang saat ini.
3. *Gender Gaiatsu: An Institutional Perspective on Womenomics* oleh Linda C. Hasunuma pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang perspektif *Womenomics* Jepang dengan negara-negara lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu bagaimana tanggapan masyarakat Jepang tentang *Abenomics* terhadap *gaiatsu* gender yang meningkat setelah kebijakan tersebut dikeluarkan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas tentang partisipasi perempuan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Shinzo Abe sedangkan penelitian Linda berfokus pada konteks feminis dan institusi gerakan di Jepang era pendudukan.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan akibat krisis ekonomi yang ada di dunia ataupun di Jepang.
2. Munculnya hubungan relasi gender hierarki dan patriarki di Jepang.
3. Adanya solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran terhadap kaum wanita.
4. Munculnya kebijakan baru yang diterapkan oleh Jepang pada tahun 2013.
5. Adanya upaya untuk memaksimalkan partisipasi wanita dalam memajukan ekonomi di Jepang

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penelitian ini membatasi masalah pada dampak munculnya *Womenomics* terhadap kesetaraan gender sebelum dan sesudah masa Perdana Menteri Shinzo Abe (2013-2022).

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan *Womenomics* di Jepang?
2. Bagaimana perkembangan *Womenomics* yang terjadi di Jepang tahun 2013-2022?
3. Dampak-dampak apakah yang terjadi terhadap kesetaraan gender pada ekonomi setelah diberlakukannya *Womenomics* oleh Shinzo Abe 2013-2022?

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut untuk:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan *Womenomics* di Jepang.

2. Mengetahui perkembangan *Womenomics* di Jepang tahun 2013-2022.
3. Menganalisis dampak-dampak yang terjadi terhadap kesetaraan gender setelah diberlakukannya *Womenomics* di Jepang oleh Shinzo Abe tahun 2013-2022.

1.7 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Womenomics*

ウーマノミクスとは、女性が活躍できる社会づくりを進め、経済の活性化につながるよう取り組んでいく社会を意味する言葉です。ウーマノミクスは、女性の活躍による経済の活性化だけでなく、女性が働き手としても消費者としても社会をけん引する経済のあり方のことを意味します。

Womenomics adalah istilah yang mempromosikan penciptaan masyarakat di mana perempuan dapat memainkan peran aktif dan bekerja untuk merevitalisasi ekonomi. *Womenomics* tidak hanya mengacu pada revitalisasi ekonomi melalui partisipasi aktif perempuan, tetapi juga pada bentuk ideal ekonomi di mana perempuan menggerakkan masyarakat baik sebagai pekerja maupun sebagai konsumen (Mitsucari, 2019)
https://mitsucari.com/blog/womenomics_company/

Womenomics sendiri merupakan kebijakan yang menghubungkan tujuan-tujuan liberalisasi pasar seluas-luasnya tanpa hambatan negara yang dipertemukan dengan peran normatif negara dalam menciptakan regulasi publik untuk menghapuskan permasalahan yang menghambat terjadinya pengembangan dan perluasan kebebasan pasar (Sekiguchi, 2014:23).

Peningkatan sektor perekonomian berbasis perempuan atau yang disebut *Womenomics* adalah upaya yang di rasa perlu untuk diterapkan demi kesejahteraan sosial, ekonomi dan peningkatan peran perempuan dalam pencapaian kesetaraan gender di Jepang oleh pemerintahan Shinzo Abe (Saputra, 2016:3-4).

Berdasarkan Pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa tentang *Womenomics* yaitu suatu kebijakan penerapan tenaga kerja pada perempuan agar setara dengan laki-laki dalam dunia kerja.

2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya pembangunan di segala bidang (Herien Puspitawati, 2013:5)

Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapatkan perlakuan adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan. (Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender, 2013:2)

Teori kesetaraan gender terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender sebagai berikut:

1. Teori *Nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki yaitu konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda.
2. Teori *Nature* adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat yang sehingga harus diterima.
3. Teori *Equilibrium* diantara kedua aliran tersebut terdapat adanya kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*Equilibrium*) yang menekankan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan perempuan dengan laki-laki (Sasanko, 2009:17-20)

Berdasarkan Pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa teori kesetaraan gender, gender merupakan suatu konsep tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari kepribadian masyarakat sosial dan pembahasan gender tidak akan pernah selesai untuk dibahas, karena gender selalu melekat seiring perkembangan zaman.

3. *Great Depressions*

Great Depressions adalah suatu peristiwa menurunnya tingkat ekonomi yang terjadi secara keseluruhan di dunia dari tahun 1920-an hingga 1930-an (Frieden, 2006:173). *Great Depressions* pada tahun 1930-an adalah fenomena di seluruh dunia yang terdiri dari peristiwa-peristiwa terpisah namun terkait dalam jumlah tidak terbatas (Roe-roe, 1988:4).

Great Depressions dikenal sebagai salah satu krisis terbesar dalam sejarah ekonomi yang menyebabkan konsekuensi ekonomi serius yang digambarkan oleh Cecchetti (1997) merupakan era penurunan harga saham di pasar saham, kepanikan bank dan krisis perbankan, pengangguran yang tinggi, ketidakjelasan dari pasar keuangan yang terus berubah-ubah, krisis mata uang, inflasi yang sangat tinggi atau sebuah kata kehancuran total dari setiap aspek ekonomi (Williams, Current, & Freidel, 1964:593).

Berdasarkan Pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa *Great Depressions* adalah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi pada tahun 1920 sampai 1930-an.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu metode kepustakaan yang mencakup jurnal, buku, artikel serta skripsi sebelumnya. Refensi utama dalam penelitian ini adalah buku yang berjudul *Abe's Legacy: How He Revived The Economy after more than Two Decades of Deflation using "Abenomics" One of His Most Well Known and Lasting Initiatives* oleh Keith C. Bennet.

1.9 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak tertentu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis, dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian sejenis mengenai perkembangan *Womenomics* di Jepang pada masa Shinzo Abe.
2. Manfaat Praktis, dapat menambah wawasan pengetahuan tentang perkembangan *Womenomics* pada masa Pemerintahan Shinzo Abe serta mengetahui kesetaraan gender yang terjadi pada masa sekarang di Jepang.

1.10 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian yang relevan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Bab ini berisi tentang kebijakan *Womenomics* dan kesetaraan gender di Jepang

Bab III Bab ini berisi tentang dampak kebijakan *Womenomics* terhadap kesetaraan gender perempuan Jepang sesudah masa Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tahun 2020-2022.

Bab IV Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan.

